



**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7.BA/SK/K.DKPP/SET-03/XI/2025

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMERIKSA DAERAH
PERIODE TAHUN 2025-2026

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 164 dan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Pemeriksa Daerah;
- b. bahwa Tim Pemeriksa Daerah Periode Tahun 2024-2025 berakhir masa tugasnya sehingga dipandang perlu mengangkat Tim Pemeriksa Daerah Periode Tahun 2025-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa Daerah Periode Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah-terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 51);
6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 692); dan
8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tim Pemeriksa Daerah Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 252).

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-771/MK.02/2020 Tanggal 13 September 2016 Hal Honorarium Persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dan Honorarium Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif dan Pilpres dan Sengketa Pilkada.

2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1147/MK.02/2020 Tanggal 14 Desember 2020 Hal Tanggapan atas Usulan Honorarium Sekretariat DKPP dalam Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMERIKSA DAERAH PERIODE TAHUN 2025-2026.
- KESATU : Mengangkat Tim Pemeriksa Daerah Periode Tahun 2025-2026 yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dengan masa jabatan sejak saat pelantikan sampai dengan tanggal 6 November 2026.
- KEDUA : Tim Pemeriksa Daerah diberikan honorarium sebagai majelis sidang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 5 November 2025.



KETUA,

HEDDY LUGITO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 7.BA/SK/K.DKPP/SET-03/XI/2025

TANGGAL : 5 NOVEMBER 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PEMERIKSA DAERAH PERIODE TAHUN 2025-2026

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
1.	Aceh	1. Marini, S.Pt., M.Si.	Masyarakat
		2. Vendio Ellafdi, S.E., Ak	Masyarakat
		3. Saiful	KIP
		4. Muhammad Sayuni	KIP
		5. Agus Syahputra, S.Sos.I., M.H.	Bawaslu
		6. Safwani, S.H., M.H	Bawaslu
2.	Sumatera Utara	1. Dr. Hisar Siregar, S.H., M.Hum.	Masyarakat
		2. Dadang Darmawan Pasaribu, S.Sos., M.Si.	Masyarakat
		3. Raja Ahab Damanik	KPU
		4. Kotaris Banurea	KPU
		5. Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.	Bawaslu
		6. Joko Arief Budiono, S.H.	Bawaslu
3.	Sumatera Barat	1. Dr. Hardi Putra Wirman, S.I.P., M.A.	Masyarakat
		2. Samaratul Fuad	Masyarakat
		3. Jons Manedi	KPU
		4. Medo Patria	KPU
		5. Vifner, SH., M.H.	Bawaslu
		6. Febrian Barteze, S.I.P.	Bawaslu
4.	Riau	1. Gema Wahyu Adinata, S.H.	Masyarakat
		2. Wankardi Wandu	Masyarakat
		3. Rusidi Rusdan	KPU
		4. Nahrawi	KPU
		5. H. Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM	Bawaslu
		6. Indra Khalid Nasution, S.H., M.H.	Bawaslu
5.	Kepulauan Riau	1. Dr. Suryadi, S.P., M.H.	Masyarakat
		2. Timbul Dompok, S.E., M.Si.	Masyarakat
		3. Indrawan Susilo Prabowoadi	KPU
		4. Ferry Muliadi Manalu	KPU
		5. Dr. Rosnawati, MA	Bawaslu
		6. Said Abdullah Dahlawi, S.T.	Bawaslu
6.	Jambi	1. Dr. H. M. Nazori, S.Ag., M.Si., MIFA	Masyarakat
		2. Dr. Mohd. Yasin, S.H.I., M.H.	Masyarakat
		3. Iron Sahroni	KPU
		4. Suparmin	KPU
		5. Ari Juniarmen, S.H., M.H.	Bawaslu
		6. Indra Tritusian, S.Pd.I.	Bawaslu
7.	Kepulauan Bangka Belitung	1. Dr. Wargianto, S.E., M.M.	Masyarakat
		2. Edi Setiawan, S.P., M.Si.	Masyarakat
		3. Yuli Restuwadi	KPU
		4. Muslim Ansori	KPU
		5. Jafri, S.Pd.Si., M.Pd.	Bawaslu
		6. Novrian Saputra, S.E., M.M.	Bawaslu

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
8.	Bengkulu	1. Prof. Dr. Emilda Sulasmi, M.Pd., CIQnR, CHRM, CPM, CT, CPSP 2. Dr. Zacky Antony, S.H., M.H	Masyarakat Masyarakat
		3. Alpin Samsen 4. Sarjan Efendi	KPU KPU
		5. Debisi Ilhodi, S.Sos. 6. Natijo Elem, S.I.Kom.	Bawaslu Bawaslu
9.	Sumatera Selatan	1. Dr. Chandra Zaky Maulana, M.M. 2. Dr. Syahril Jamil, M.Ag.	Masyarakat Masyarakat
		3. Handoko 4. Prahara Andri Kusuma	KPU KPU
		5. Ardiyanto, S.Pd. C.Med 6. Dra. Massuryati	Bawaslu Bawaslu
10.	Lampung	1. Prof. Dr. Fitri Yanti, M.A. 2. Dr. Heru Juabdin Sada, M.Pd.I.	Masyarakat Masyarakat
		3. Ahmad Zamroni 4. Angga Lazuardy	KPU KPU
		5. Gistiawan, S.H., M.H. 6. Imam Bukhori, S.H.	Bawaslu Bawaslu
11.	DKI Jakarta	1. Prof. Dr. Suparji Achmad, S.H., M.H. 2. Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.	Masyarakat Masyarakat
		3. Dody Wijaya 4. Astri Megatari	KPU KPU
		5. Munandar Nugraha 6. Reki Putera Jaya	Bawaslu Bawaslu
12.	Banten	1. Dr. Firdaus, S.H., M.H. 2. M. Fahmi Musyafa	Masyarakat Masyarakat
		3. Aas Satibi 4. Akhmad Subagja	KPU KPU
		5. Ali Faisal S.H., M.H., M.E. 6. Ade Wahyu Hidayat S.Psi, M.I.K.	Bawaslu Bawaslu
13.	Jawa Barat	1. Firman Manan, S.IP., M.A. 2. Martinus Basuki Herlambang, S.E., S.H., M.H.	Masyarakat Masyarakat
		3. Ahmad Nur Hidayat 4. Adie Saputro	KPU KPU
		5. H. Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi., M.MPd. 6. Muamarullah, S.Sos.I.	Bawaslu Bawaslu
14.	Jawa Tengah	1. Dr. Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H. 2. Dra. Puji Astuti, M.Si.	Masyarakat Masyarakat
		3. Muslim Aisha 4. Mey Nurlela	KPU KPU
		5. Muhammad Amin, S.AP., M.H. 6. Nur Kholiq, S.H., S.Th.I., M.Kn.	Bawaslu Bawaslu
15.	Jawa Timur	1. Eko Sasmito, S.H., M.H. 2. Hari Tri Wasono, S.H.	Masyarakat Masyarakat
		3. Eka Wisnu Wardhana 4. Choirul Umam	KPU KPU
		5. Eka Rahmawati, S. Sos., M.M. 6. Dewita Hayu Shinta, S.P., M.Si.	Bawaslu Bawaslu
16.	D.I. Yogyakarta	1. Retno Agustin, S.Sos., M.Hum., M.Dev.Stu. 2. Drs. Arif Nurcahyo, M.A.	Masyarakat Masyarakat

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
		3. Ahmad Shidqi 4. Tri Mulatsih	KPU KPU
		5. Bayu Mardinta Kurniawan, S.I.P. 6. Agung Nugroho	Bawaslu Bawaslu
17.	Bali	1. Dr. I Made Anom Wiranata, S.IP., MA 2. Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn. 3. Anak Agung Gede Raka Nakula 4. Luh Putu Sri Widyastini	Masyarakat Masyarakat KPU KPU
		5. I Wayan Wirka, S.H., M.H. 6. Gede Sutrawan, S.Sn., M.Sn.	Bawaslu Bawaslu
18.	Nusa Tenggara Barat	1. Dr. Syafril, S.Pd., M.Pd. 2. Ismail, S.H. 3. Agus Hilman 4. Mastur	Masyarakat Masyarakat KPU KPU
		5. Suhardi, S.I.P., M.H. 6. Syaifuddin, S.H.	Bawaslu Bawaslu
19.	Nusa Tenggara Timur	1. Farhan Suhada, S.Sos., M.Si. 2. Yosep Dasi Jawa, S.H. 3. Lodowyk Fredrik 4. Baharudin Hamzah	Masyarakat Masyarakat KPU KPU
		5. Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H. 6. Amrunur Muh Darwan, S.Si.	Bawaslu Bawaslu
20.	Kalimantan Barat	1. Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum. 2. M. Fajrin, S.H., M.H. 3. Muhammad Syarifuddin Budi 4. Syarifah Nuraini	Masyarakat Masyarakat KPU KPU
		5. Agnesia Ermi, S.Pd., M.H. 6. Faisal Riza, S.T., M.H.	Bawaslu Bawaslu
21.	Kalimantan Tengah	1. Dr. Tri Hidayati, S.H.I., M.H. 2. Dr. Anyualatha Haridison, M.Si. 3. Tity Yukrisna 4. Dwi Swasono	Masyarakat Masyarakat KPU KPU
		5. Nurhalina, M.Epid 6. Benny Setia, SE., MM, MSM	Bawaslu Bawaslu
22.	Kalimantan Selatan	1. Prof. Dr. Ani Cahyadi, S.Ag., M. Pd. 2. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn 3. Andi Tenri Somp 4. M. Fahmi Failasopa	Masyarakat Masyarakat KPU KPU
		5. Muhammad Radini, S.H.I, M.H. 6. Thessa Aji Budiono, S.Pd.i., M.H.	Bawaslu Bawaslu
23.	Kalimantan Timur	1. Ebin Marwi, S.H.I., M.H. 2. Hairul Anwar, S.E., M.A. 3. Abdul Qayyim Rasyid 4. Ramaon Dearnov Saragih	Masyarakat Masyarakat KPU KPU
		5. Galeh Akbar Tanjung, S.Sos., M.AP. 6. Danny Bunga, S.H.	Bawaslu Bawaslu
24.	Kalimantan Utara	1. Dr. Ir. Adi Sutrisno., M.P 2. Oche William Keintjem, S.H.,M.H. 3. Hariyadi Hamid 4. Chairullizza	Masyarakat Masyarakat KPU KPU
		5. Ruliyana, S.H., M.H., C.Med.C.L.A 6. Donny, S.Th., M.H., C.Med	Bawaslu Bawaslu

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
25.	Gorontalo	1. Dr. Ramli Mahmud, S.Pd., M.A	Masyarakat
		2. Dr. Sri Dewi Rahmawati Nani, S.H., M.H.	Masyarakat
		3. Risan Pakaya	KPU
		4. Roy Hamrain	KPU
		5. Dr. Lismawy Ibrahim, S.Pd., S.H., M.Pd.	Bawaslu
		6. Wahyudin M. Akili, S.E., M.H.	Bawaslu
26.	Sulawesi Utara	1. Presly Prayogo, S.H., M.H.	Masyarakat
		2. Anis R. Toma, S.Pd.I., M.Pd.	Masyarakat
		3. Meidy Yafeth Tinangon	KPU
		4. Awaluddin Umbola	KPU
		5. Zulkifli Densi, S.Pd., M.H.	Bawaslu
		6. Steffen Stevanus Linu, S.S., M.A.P.	Bawaslu
27.	Sulawesi Barat	1. Dr. Fitrinela Patonangi, S.H., M.H.	Masyarakat
		2. Muhammad Rivai, S.Pd.I., M.Pd.I.	Masyarakat
		3. Asriani	KPU
		4. Supriadi Narno	KPU
		5. Arham Syah, S.H., M.H.	Bawaslu
		6. Hamrana Hakim, S.Pd.	Bawaslu
28.	Sulawesi Tengah	1. Dr. Muja'hidah, S.H., M.H.	Masyarakat
		2. Rifai, S.E., M.M.	Masyarakat
		3. Dirwansyah Putra	KPU
		4. Christian Adiputra Oruwo	KPU
		5. Nasrun, S.Pd.I., M.A.P.	Bawaslu
		6. Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M.	Bawaslu
29.	Sulawesi Tenggara	1. Prof. Iskandar, S.P., M.Si., Ph.D.	Masyarakat
		2. Dr. Ahmad Rustan, S.H., M.H.	Masyarakat
		3. Amirudin	KPU
		4. Muhammad Mu'min Fahimuddin	KPU
		5. Bahari, S.Si., S.H., M.P., M.H.	Bawaslu
		6. Darma, S.Si., S.H., M.H.	Bawaslu
30.	Sulawesi Selatan	1. Dr. Fauzia P. Bakti., S.H., M.H.	Masyarakat
		2. Ir. Mirfan, S.Kom., M.T., M.Kom., IPM, ASEAN Eng	Masyarakat
		3. Hasrudin Husain	KPU
		4. Romy Harminto	KPU
		5. Dr. H. Samsuar Saleh, S.IP., M.Si.	Bawaslu
		6. Alamsyah, S.H.	Bawaslu
31.	Maluku	1. Dr. Djufri Rays Pattilouw, S.E., M.Si.	Masyarakat
		2. Dr. Hanok Mandaku, S.T., M.T.	Masyarakat
		3. Syarif Mahulauw	KPU
		4. Engelbertus Dumatubun	KPU
		5. Dr. Stevin Melay, M.Si.	Bawaslu
		6. Astuti Usman, S.Ag., M.H.	Bawaslu
32.	Maluku Utara	1. Dr. Gunawan A. Tauda, S.H. LL.M.	Masyarakat
		2. Rahmatullah Yahya, S.E., M.Si.	Masyarakat
		3. Reni Syafruddin A Banjar	KPU
		4. Mukhtar Yusuf	KPU
		5. Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.	Bawaslu
		6. Suleman Patras, S.Sos.	Bawaslu
33.	Papua	1. Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	Masyarakat
		2. Johannes H. Winerungan, S.H.	Masyarakat
		3. Diana Dortha Simbiak	KPU
		4. Amijaya Halim	KPU

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
		5. Hardin Halidin 6. Amandus Situmorang	Bawaslu Bawaslu
34.	Papua Barat	1. Deliana Kuway, S.Th., M.Pd. 2. Eduard Kuway, S.H. 3. Abdul Muin Salewe 4. Endang Wulansari 5. Nortbertus, S.P., M.Hum. 6. Menahen Julens Sabarofek, S.I.P.	Masyarakat Masyarakat KPU KPU Bawaslu Bawaslu
35.	Papua Selatan	1. Moksen Badilla, S.T. 2. Jeremias Yumame 3. Helda Richarda Ambay 4. Daniel Ndiwaen 5. Marman, S.Sos., M.Si. 6. Ahmad Muhazir, S.E., M.Si.	Masyarakat Masyarakat KPU KPU Bawaslu Bawaslu
36.	Papua Tengah	1. Eddy Clifyan Wabes, S.H., M.H., CPM 2. Yulianus Nukuwo, S.Sos. 3. Jennifer Darling Tabuni 4. Octovianus Takimai 5. Yefri Miagoni, S.I.P. 6. Melianus Julius Korisano, S.T.	Masyarakat Masyarakat KPU KPU Bawaslu Bawaslu
37.	Papua Pegunungan	1. Yupri Yikwa, S.E., M.M. 2. Yance Tenouye, S.H. 3. Ansar S 4. Naftali Emanuel Paweka 5. Sanggup Abidin, S.Pd., M.Si., CRMO 6. Wees Yigibalom, S.I.P.	Masyarakat Masyarakat KPU KPU Bawaslu Bawaslu
38.	Papua Barat Daya	1. Roberth B. Yumame 2. Baharudin A. Canno 3. Jefri Obeth Kambu 4. Muhammad Gandhi Siradjuddin 5. Zatriawati 6. Herdy Funce Rumbewas	Masyarakat Masyarakat KPU KPU Bawaslu Bawaslu

KETUA
HEDDY LUGITO